

BAB III

PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TERHADAP KEKUASAAN POLITIK

A. Landasan Etik Politik Islam Secara Umum

Pada tataran historis dan normatif ajaran, Islam dan politik memiliki ikatan yang sangat erat, Dan jika keduanya dipahami sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia . Islam tidak cuma dijadikan sebagai “alat legitimasi” untuk mencapai kekuasaan legitimasi. Politik yang dipahami sebagian dengan mengesampingkan pemahaman yang lebih jelas mengaburkan makna dan menyangkal kontribusi Islam bagi dunia politik itu sendiri. dengan demikian, Islam harus juga dijadikan sebagai sumber inspirasi budaya dan kerangka paradigmatik yang dinamis dalam pemikiran politik.¹⁹

Ajaran dan gagasan politik Islam sebagai hasil dari sistematisasi tradisi Islam dalam kerangka agama dan bidang politik Islam muncul dengan pesatnya ekspansi Islam di luar Arab. Hal ini menimbulkan permasalahan baru mengenai rezim pengaturan negara (kekuasaan), selain konsekuensi logis dari munculnya kelompok kepentingan . Kelompok-kelompok ini, baik berdasarkan sosial budaya maupun aspek sosial-keagamaan tertentu, merasa telah ikut serta dalam proses Jihad.²⁰

Pernyataan Abu A'la Al Maudud bahwa agama yang berkuasa dapat menjadi lebih kuat, sedangkan kekuasaan dalam agama dapat lebih hadir dan utuh, tampaknya juga patut untuk dievaluasi.²¹ Dan berkaitan esensial-praktis Antara Agama dan politik (kekuasaan) sebenarnya sudah lama dijelaskan oleh berbagai tokoh seperti Ibnu Sina, Al Farabi, Al Kindi, Al-Ghazali dan tokoh jalur teologis seperti Plato, Aristoteles dan lain sebagainya.

¹⁹ Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 1-2.

²⁰ *Ibid.*, p. 3.

²¹ Eko Maulana Ali Suroso, *Energi Agama dalam Kuasa, Merapikan Nilai-Nilai Agama dalam Pemerintahan*, (Bandung: Mutiara Press, 2008), h. 182. Perhatikan pula pengantar M. Dawam Rahardjo

Dapat juga diartikan bahwa perubahan atau perbedaan pemikiran politik dalam Islam ini tampaknya lebih disebabkan oleh cara dan semangat teks-teks normatif agama diinterpretasikan di samping perbedaan sosio-kultural yang melingkupinya. Perhatian utama Alquran adalah untuk menciptakan landasan etis bagi pembentukan sistem politik berdasarkan prinsip menjaga masyarakat (bermoral) yang adil dan bermoral. Dan salah satu isu paling kontroversial dalam sejarah pemikiran politik Islam adalah isu Khilafah . Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, masyarakat Islam baru langsung menghadapi krisis konstitusi terkait pemilihan kepala negara pengganti Nabi Muhammad. Hal ini karena di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada ketentuan yang mutlak jelas, lengkap, final, tanpa diganggu berfungsinya mekanisme akal manusia, bentuk pemerintahan dan lembaga politik.

Gambaran dinamis di atas dapat diartikan bahwa diamnya al-Qur'an terhadap persoalan ini memberikan jaminan dan kesempatan kepada umat Islam untuk terus melakukan analisis, penelitian dan kritik diri yang membangun sambil membentuk sistem politik mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu kajian pemikiran politik Islam dan sistem ketatanegaraannya pada Islam harus diarahkan pada upaya menerjemahkan cita-cita politik Islam, menciptakan bentuk dan sistem politik pada tahun yang sesuai dengan etika Al-Qur'an. an dan As. Sunnah.

Jumlah penduduk umat Islam yang dianggap sangat luar biasa membuat banyak pihak melirikinya bahkan mengganggu ketentraman dan kerukunan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kaitannya dengan perjuangan sosial dan politik mereka. Begitu banyak ide-ide baru lahir yang seolah ingin memperbaiki peradaban Islam, namun pada dasarnya juga berorientasi pada singgasana kekuasaan, di mana konsep dan ide disalurkan buah pemikirannya tentang Islam. Hal itu terungkap baru-baru ini di Indonesia.

Diperlukan landasan politik strategis untuk mencegah semua ini dan akan menguntungkan semua komunitas Muslim di seluruh dunia. Dengan demikian, studi mendalam dan mendalam tentang politik Islam sangat penting bagi kelompok-kelompok Muslim untuk mencapai kesepakatan tentang isu-isu politik.

Maksudnya jelas bahwa energi potensial yang berlebihan dan tinggi dalam tubuh Islam tidak boleh disia-siakan hanya di antara saudara-saudaranya sendiri dengan menumpahkan darah dengan kedok klaim kebenaran kedua belah pihak. Atau karena ia ingin mendapatkan legitimasi kekuasaan politik hanya untuk keuntungannya sendiri dan mengabaikan esensi eksistensi Islam yang diperjuangkan Nabi Muhammad dengan begitu mulia.

B. Konsep Dasar Politik dalam Ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah

Secara harfiah, Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah pengikut Sunnah Nabi dan Sahabat. Istilah ini pertama kali digunakan pada abad kedua Hijriyyah. Dan menurut Hadits , pengikut Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah satu-satunya "kelompok yang aman dari " (firqah al-Najiyah) dari 73 kelompok dalam Islam. Selama berabad-abad, Ahlussunnah Wal Jama'ah menjadi warisan sejarah yang juga merambah arena politik. Padahal secara kontekstual pengikut Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah pengikut sunnah Nabi dan ijma' para ulama.²²

Prinsip umum ajaran sosial politik Sunni adalah sikap tawasuth, tawazun, ta'addul dan tasamuh dan al-qiyam bi al-qadim as-shalih wa al-akhdzu bi aljadid al-ashlah. Menurut prinsip ini, Sunni selalu mengambil sikap damai, toleran, moderat dan menghindari sikap ekstrim dalam menghadapi setiap spektrum budaya, termasuk budaya politik kekuasaan. Dalam konteks politik, sikap seperti itu dijadikan kerangka dan acuan paradigmatic bagi seluruh pemikiran dan pemaparan politik .

Menurut pendapat Sunni, pembentukan negara adalah wajib syar'i karena Syari'at tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan para negara. kekuasaan Inilah bukti pertama angka yang selalu ditarik oleh mazhab Sunni atau Ahlussunnah Wa al-Jamaah, khususnya ketika dihadapkan pada krisis sosio-politik utilitas atau kebajikan karena kelangsungan umat secara umum. Dengan demikian, keberadaan kepala negara tidak hanya menjamin keselamatan warga negara, tetapi juga kelangsungan pendidikan agama.

²² Suaidi Asy'ari, *Nalar Politik NU & Muhammadiyah: Over Crossing Java Sentris*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 102.

Dari sudut pandang mazhab Sunni, negara adalah perwujudan kepemimpinan kenabian, yang bertugas meneruskan misi kenabian, yaitu pemeliharaan agama dan pengaturan pranata sosial. Dan kewajiban mendirikan negara adalah kewajiban bersama seluruh rakyat (*fardlu kifayah*). Namun, menurut versi al-Ghazali, para pemikir politik Sunni biasanya mencoba menggambarkan hubungan (relasi) antara agama dan negara dengan model penalaran simbiosis mutualisme dalam kerangka interdependensi. Model bangunan pemikiran politik Sunni tersebut tentunya didorong oleh banyak faktor, seperti kondisi sosial-keagamaan, budaya dan politik yang melingkupi kehidupan Sunni.²³

Ideologi Ahlul-sunnah Wal Jama'ah yang pernah melegenda membuat banyak partai Islam mendasarkan paham keagamaan dan kebijakan politiknya pada paham yang dianut sebagian besar umat Islam. Maka setiap pemahaman yang bertanda Ahlul-sunnah Wal Jama'ah harus diseleksi dan ditimbang secara seksama, tentunya menjadikan diskusi ilmiah yang beradab dan bertanggung jawab dengan referensi yang lengkap dan kuat, itulah konsep dasar pemerintahan Islam, yaitu. rahmatan lil 'alamin, benar-benar dapat mewujudkan

C. Paradigma Kekuasaan Politik dalam Nahdlatul Ulama

Paradigma adalah nilai yang membentuk cara berpikir seseorang atau sekelompok sebagai titik tolak pandangannya sehingga membentuk gambaran subjektif tentang realitas dan pada akhirnya menentukan bagaimana mereka menyikapi realitas tersebut. Dalam bahasa sederhana, paradigma adalah sudut pandang, cara berpikir, cara berfikir. Meskipun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) paradigma diartikan sebagai keadaan pikiran.

KH Sahal Mahfudh menegaskan, ada 3 paradigma politik yang berbeda di NU, yaitu politik negara, kemasyarakatan, dan kekuasaan. Tepatnya KH untuk NU. Dari ketiga jenis politik tersebut, Sahal justru memiliki politik kekuasaan terendah (praktis) dengan . kursi. Pernyataan ini secara implisit mengingatkan para politisi NU yang meninggalkan strategi dasar 1926, termasuk politisi yang baru-baru ini

²³ Ridwan, *Paradigma Politik NU*, h. 7-11.

menempe diri ke dalam perahu politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PKNU dan lain-lain.

Karena kompleksitas pembangunan politik Indonesia, perjalanan politik NU juga berkembang pesat. NU bersentuhan dengan politik kenegaraan (kewarganegaraan), khususnya pada masa pasca kemerdekaan. Kontak ini merupakan hasil dari gerakan nasional di beberapa negara yang bergerak menuju kemerdekaan. Sumbangan politik NU yang paling nyata bagi kenegaraan adalah dukungan Wahid Hasyim, wakil NU di PPKI, terhadap dikeluarkannya Piagam Jakarta dan isinya dari konstitusi negara kita.²⁴

Esensi NU tidak didasarkan pada tujuan politik kekuasaan saja, tetapi pada politik (agama), yang selalu berbasis pada orang. Dengan demikian, bagi umat Islam Indonesia yang menginginkan penerapan praktik dan gagasan keagamaannya dekat dengan tradisi lokal, kehadiran NU dipandang sebagai pelindung. Jika ini bisa disebut sebagai tindakan politik kerakyatan dalam arti yang lebih luas, politik jenis ini layak disebut level politik tertinggi NU. Dari segi politik kekuasaan, partisipasi NU pertama ditandai dengan mendukung posisi Masyum. Ketika menjadi organisasi pendukung Masyum, tokoh-tokoh NU terlibat dalam perebutan kekuasaan, baik di dalam maupun di luar partai. Kekuasaan periode ini berakhir dengan pemisahan, konflik politik yang dianggap kurang nyaman. Partisipasi terkuat dalam kekuasaan politik, yaitu ketika NU berfungsi sebagai partai politik (1952) setelah pengunduran diri atau pemisahan Masyum.²⁵

Tentu saja, sebagai ormas besar yang sudah lama berkecimpung dalam politik darat dan air, tidak ada salahnya NU memiliki wadah bagi anggotanya untuk mengajukan aspirasi politik. Hal ini menghindari perpecahan di dalam NU, meskipun keterbukaan internal NU dalam mengarahkan aspirasi politik warga berjalan dengan baik.²⁶

²⁴ Khamami Zada & A. Fawaid Sjadzili, *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 3-5.

²⁵ Abu Dzarrin Al-Hamidy, dkk, *Sarung & Demokrasi*, h. 5.

²⁶ Bahrul „Ulum, *Bodohnya NU apa NU DI Bodohi? Jejak Langkah NU Era Reformasi; Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik*, (Semarang: Ar-Ruzz Press & PWIPNU Jawa Tengah, 2002), h. 55- 80.

Politik NU adalah politik kebangsaan, bukan politik kepentingan sesaat. Ini bukan politik partai, tapi politik paradigma universalis. Sehingga tidak mencederai cita-cita luhur para pendiri NU dan dapat berpartisipasi dalam dan membangun masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam nasionalisme dan kesadaran sosial yang tinggi. Agar semuanya terjadi, kekuasaan bukanlah jalan pintas yang harus diambil. Itu hanya alat. Namun pendekatan kultural organisasi NU dan sikap orang bisa menjadi alternatif sekaligus menumbuhkan kewibawaan tersendiri bagi NU.

Meski belakangan ini NU terjebak dalam situasi yang agak sangat dilematis dan menentukan. Di satu sisi NU praktis tidak mau berpolitik, di sisi lain sangat sulit mengekang "nafsu politik" para tokoh NU. Nampaknya, karena jiwa politik NU sudah mengakar kuat, tampaknya NU tidak bisa sedetik pun meninggalkan arena politik yang menawarkan manisnya semu itu. Hal ini secara gamblang dinyatakan oleh Asep Saeful Muhtadi bahwa mau tidak mau NU harus mengambil kebijakan untuk mengarahkan ghira atau energi politik kepada sebagian umat, elit dan lembaga. Padahal, jauh sebelum berdirinya NU, KH telah menciptakan awal kekuatan politik Islam tradisional di NU.

Wahab Hasbullah, KH Wahab Hasbullah banyak melakukan kesepakatan untuk mewujudkan kekuasaan politik. Hasilnya adalah tumbuhnya nama lembaga Nahdlatul Tujjar, Nahdlatul Wathan, Subbanul Wathan dan Tashwirul Afkar. Ketiga institusi ini kemudian melahirkan banyak gerakan kebajikan dengan keunikannya masing-masing. Kemudian pada tahun 1945, NU mengeluarkan Resolusi Jihad yang menurunkan semangat juang para pembela Republik khususnya di wilayah Jawa Timur. Melalui wakilnya di PPKI.

KH. A. Wahid Hasyim, NU menolak keras "Piagam Jakarta" tentang persatuan bangsa. Pada tahun 1950-an, NU mengkritisi gerakan separatis dengan nama keagamaan, seperti DI/TII di Jawa Barat, PRRI/Permesta, dan Pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini juga fenomena terkini, khususnya di Indonesia, yang dilakukan NU, mengimbangi penyebaran gerakan HTI.

Untuk mempertahankan legitimasi pemerintahan pada masa Krisis, NU memberi Soekarno julukan waliyyul amri al-dlaruri bi alsyaukah pada tahun 1953, mengakui legitimasi kekuatan nasional dari perspektif agama, dan anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa para pendiri NU adalah tokoh-tokoh politik yang sangat cerdas dan brilian. Meski tidak terang-terangan menyatakan suara politiknya, namun sikap dan kegemukan mereka diarahkan untuk kelangsungan pemerintahan yang adil. Karena seperti disebutkan sebelumnya di Syariah tidak akan ditegakkan tanpa pemerintahan yang efektif.

Sebagai organisasi sosial politik keagamaan, NU tidak pernah terlibat dalam kerusuhan umat Islam. Pengabdian kepada negara dan bangsa ditempatkan di atas segalanya karena NU memahami bahwa keberadaan negara adalah pusat kehidupan beragama dan manusia mengikuti teladan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.

NU memiliki beberapa model politik. Dan dua model politik NU yaitu model politik kerakyatan dan politik kebangsaan merupakan pengalaman ideal dalam sejarah NU. Mengapa? Kedua model ini menjadikan NU sebagai organisasi keagamaan yang berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan bersama (mashlahatul 'ammah). Namun NU terbukti relatif dinamis dalam mempertahankan kedua model politik tersebut dari godaan politik kekuasaan, baik dari tokoh NU sendiri maupun dari luar NU. Dan sebagaimana disebutkan sebelumnya, keterlibatan pertama NU dalam politik kekuasaan adalah ketika memberikan dukungan organisasi kepada para pendiri Masyumin (an) untuk memasuki politik.

Keterlibatan ini berawal dari afiliasi NU dengan Al Majlisul Islami 'Ala Indonesia (MIAI) bersama Sarekat Islam, Muhammadiyah, Al Erysyad dan beberapa ormas Islam lainnya. NU juga mendukung berdirinya Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPPI) pada tahun 1939. Namun kiprah NU, khususnya pada Masyum, tidak berlangsung lama. Dalam Masyum benturan kepentingan dan konflik lama antara kubu tradisional dan kubu modern kembali muncul.

Penggusuran peran politik kader NU di Masyum oleh kelompok modernis dan cendekiawan Muslim menimbulkan kekecewaan politik di kalangan NU. Dan untuk menjawab keraguan kalangan politik saat itu, NU memutuskan untuk

menjadi partai politik dan menentang pemilu 1955. NU berhasil membuktikan dirinya sebagai partai yang dapat diperhitungkan dalam rencana politik nasional. ke atas Dalam pemilu tersebut, NU berada di urutan ketiga setelah PNI dan Masyumi dengan . kursi DPR (18, % suara). Di satu sisi, hasil ini memperkuat kepercayaan diri warga NU, namun di sisi lain semakin menjadi magnet untuk menarik NU ke dalam perjuangan politik yang lebih pragmatis, membawanya ke dalam masyarakat asli.

organisasi keagamaan NU bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1973 atas permintaan pejabat Orde Baru. Memperebutkan pemilu 1977 dan 1982 dengan PPP. Pada muktamar NU di Situbondo, NU mendeklarasikan kembali ke Khittah 1926, yaitu tidak lagi berpolitik praktis. Namun setelah reformasi tahun 1998, muncul partai-partai yang berpihak pada NU. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dicanangkan oleh Abdurahman Wahid (Gus Dur), yang menjadi sosok fenomenal. Pada Pemilu 1999, PKB meraih 51 kursi dan . kursi di DPR sehingga Abdurahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada Pemilu 2004 PKB meraih 52 kursi DPR.²⁷ Setelah mendapat kesempatan di DPR, NU terjun ke dunia politik dan tidak hanya menjadi ormas Islam tetapi menjadi ormas atau partai politik. Menurut Greg Fealy, tujuan politik NU menjadi partai adalah 1. mengarahkan dana pemerintah ke NU, 2. memperoleh peluang bisnis dan 3. menjalankan tugas-tugas birokrasi.²⁸

D. Doktrin dan Tujuan Politik Nahdlatul Ulama

Seperti ajaran Islam tradisional lainnya, NU menggunakan ide-ide politik Sunni klasik sebagai referensi teoretis utamanya. Naskah NU banyak memuat kutipan-kutipan dari karya-karya al-Mawardi, al-Ghazali, al-Baqillan dan lain-lain.²⁹ Inilah landasan formal pendekatan politik NU, serupa dengan fikih abad pertengahan. Sebagian besar pengurus NU tahun 1950-an dan 1960-an merupakan produk pendidikan pesantren dengan mata pelajaran fikih. Dan bagi

²⁷ Asep Ahmad Hidayat dkk, *Studi Islam*, h. 250.

²⁸ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKIS, 2011), h. 165.

²⁹ *Ibid.*, h. 65.

tradisionalisme, fikih adalah ratu ilmu.³⁰ Prinsip-prinsip yang menjadi dasar keputusan politik paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan politik NU dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: diskresi, fleksibilitas, dan moderasi. Ketiga kategori ini saling terkait dan didasarkan pada berbagai prinsip fikih. Istilah kebijakan dalam hal ini digunakan dalam arti netral, yaitu pelaksanaan kegiatan yang mendorong upaya memperoleh keuntungan atau menghindari kemudharatan.³¹ Ciri lain dari pemikiran politik NU adalah fleksibilitas. Fleksibilitas dalam pengambilan keputusan sebagian merupakan penerapan kaidah fikih.

Krisis membutuhkan perhitungan untung dan rugi yang baru sehingga sikap atau posisi sebelumnya dapat direvisi. Di sisi lain, moderasi dapat diartikan sebagai keinginan untuk menghindari tindakan ekstrem dan berhati-hati dalam bertindak dan mengungkapkan pendapat. Dan dalam makrodiscourse NU, ide ini tergambar dengan gamblang. Perilaku rasional dan terutama kecenderungan untuk memilih jalan yang sering disebut “jalan tengah” ditemukan baik dalam pemikiran Islam maupun dalam cita-cita kebudayaan Jawa.³²

E. Tujuan Kekuasaan Politik NU

Cara paling jelas menggunakan kekuasaan politik untuk mencapai tujuan Islam adalah melalui polisi dan hukum. Tujuan utama adalah untuk memastikan penerapan hukum Islam sebaik mungkin. Dalam hal ini meliputi penerapan aspek hukum perkawinan dan pewarisan, ketentuan pembayaran dan pembagian zakat, waktu shalat jumat atau kegiatan keagamaan di bulan Ramadhan, dan sebagainya.³³

Tujuan politik NU terdiri dari tiga bagian utama, yang secara teori berkaitan erat dengan tujuan keagamaannya, seperti dikemukakan Greg Fealy. Pertama, alokasi dana pemerintah kepada masyarakat NU, terutama untuk perbaikan sarana pendidikan dan keagamaan seperti pesantren, madrasah dan masjid, serta

³⁰ Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi: Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 168.

³¹ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama*, h. 66-7.

³² *Ibid.*, h. 73-7.

³³ *Ibid.*, h. 82.

membangun dan memelihara infrastruktur sosial seperti puskesmas, panti asuhan dan tempat pertemuan. Kedua, pemerintah berusaha mendapatkan peluang bisnis bagi NU dan warganya. Peluang tersebut akan langsung menguntungkan mereka yang mendapatkan tempat dan dianggap mampu Islam dan orang pada umumnya. Semakin kaya anggota masyarakat, semakin mampu mereka memenuhi kewajiban sosial dan keagamaannya, seperti menunaikan ibadah haji, menunaikan zakat, dan mendukung usaha pendidikan dan sosial Islam.³⁴

Tujuan politik ketiga adalah agar warga NU mendapat tempat di birokrasi . Pada masa kolonial, santri tradisional umumnya menjauhkan diri dari lembaga negara dan mengembangkan usaha di sektor swasta dan sektor informal. Setelah kemerdekaan, birokrasi dipandang sebagai jalan menuju mobilitas dan status sosial.

Masuknya umat Islam tradisional ke dalam birokrasi diyakini akan meningkatkan posisi NU di masyarakat Indonesia dan memperkuat suara Ummat di kalangan pemerintahan.³⁵ pendukung tradisional Tujuan ini terkadang tersirat dalam literatur NU, namun jarang didiskusikan. Tidak dipresentasikan dan serius. Namun, pentingnya motivasi politik tersebut dapat dilihat lebih jelas dalam forum-forum korespondensi dalam partai politik.

Krisis dari sisi material dan impotensi politik umat Islam mempersulit pelaksanaan dan penyebaran ibadah Islam. Selanjutnya, orang muslim yang miskin tidak dapat diharapkan untuk menunaikan rukun Islam, terutama menunaikan ibadah haji dan membayar zakat. Maka kaitan kesejahteraan sosial dengan religiusitas terkandung dalam konsep Izzul Islam Wal Muslimin yang secara harfiah berarti “keagungan Islam dan umatnya”. Itu didasarkan pada keyakinan pada sikap dan tindakan Islami . Mereka harus bangga dengan agamanya, berjuang untuk melestarikan dan menyebarkan ajarannya dan mewujudkan negara yang adil, makmur, dan dinamis yang layak bagi orang-orang

³⁴ Lik Arifin Mansurnoor, *Islam in Indonesia World: Ulama of Madura*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), h. 261.

³⁵ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama*, h. 84.

beriman sejati.³⁶ Konsep serupa lainnya adalah Mab'adi Khaira Umm'ah. Dan prinsip-prinsip kebaikan manusia, pertama kali dirumuskan oleh Machfoedz Shiddiq pada akhir tahun 1930-an.

Kemampuan masyarakat untuk menolong diri sendiri melalui tindakan kolektif. Konsep didasarkan pada keyakinan bahwa Islam tidak dapat mewujudkan dan aspirasi keagamaannya tanpa landasan ekonomi yang kuat. Semangat mulia zakat dalam Islam, meniru proses pemikiran Masdar F. Mas'ud, sebenarnya yang di artikan untuk mengaktualisasikan identitas manusia dalam dimensi kesadaran etis dan moralitas yang peka terhadap realitas sosial. Selain terkait dengan amanat transenden Allah SWT, juga sepenuhnya diarahkan untuk mengarah kepada Allah SWT sebagai realitas sosial yang obyektif dan imanen yang berlandaskan keadilan.

Sejak peduli dengan kesejahteraan material para anggotanya, Setidaknya kesadaran itu dibuktikan dengan lahirnya dan gerakan Nahdlatu al-Tujjar sebagai embrio awal kehadiran NU di tanah air. Dan sementara tujuan NU pada awalnya dicapai melalui kegiatan non-politik di sektor swasta, menurut Ali Haidar, pada tahun 1930-an organisasi ini semakin terlibat dalam ikut melindungi kepentingan ekonominya dalam persaingan dengan NU, Belanda, dan Cina.³⁷ Jelas bahwa pendekatan politik ini partisan, tetapi apakah itu berarti oportunistik? seperti yang sering dikatakan pendukung NU? Jawabannya sangat bergantung pada definisi istilah "oportunistik", dan inilah yang sering diabaikan oleh para kritikus.

Ketika istilah "oportunistik" digunakan untuk menyebut orang atau organisasi yang memanfaatkan setiap kesempatan, istilah itu cukup tepat untuk menggambarkan NU. Padahal, istilah tersebut biasanya dimaksudkan untuk secara halus menunjukkan bahwa NU menggunakan semua opsi yang ada dengan cara yang "irasional". Namun, pernyataan ini dapat dipertanyakan. Asumsi lain yang mendasari kritik terhadap NU sebagai "tidak berprinsip" dan "oportunistik" adalah anggapan bahwa prinsip itu lebih bersifat moral daripada praktis. Dengan

³⁶ Achmad Siddiq, *Pedoman Berpikir Nahdlatul Ulama (fikiran Nahdliyah)*, (Jember: PMII Tjabang Djember, 1969), h. 12.

³⁷ Ali Haidar, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 98.

demikian, penerapan prinsip-prinsip moral dipandang membatasi tindakan pragmatis atau mementingkan diri sendiri demi kebaikan gereja dan umatnya.

Wabil khusus, sekedar pemaksimalan tarekat atau cara mewujudkan diri sebagai unsur sosial, yang tidak bisa pasif. Ini hal yang lumrah, lumrah dan (mungkin) pantas untuk diabadikan dalam kumpulan . lembaga publik yang ada dan “eksis” untuk keberlangsungan orang secara makro Dalam masa yang tak terbatas.

F. Dinamika Kekuasaan Politik Nahdlatul Ulama

1. NU 1952 (Penarikan Diri NU)

Hengkangnya NU dari Masyum merupakan guncangan terbesar dalam perjalanan politik Islam di awal tahun 1950-an. Masyumi didirikan dengan prinsip bahwa umat Islam Indonesia harus menyatukan aspirasi politiknya dan melakukan perjuangannya melalui satu partai . Penarikan NU pada tahun 1952 bukanlah perpecahan pertama yang dialami Masyum - Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), penerus Sarekat Islam (SI), meninggalkan Masyum pada tahun 1947 tetapi itu adalah masalah yang sangat serius.

Peristiwa ini mengakibatkan hilangnya anggota Masyumi, organisasi Muslim tradisional terbesar dan paling representatif. Bagi komunitas Muslim saat itu, itu juga menandakan munculnya kembali permusuhan tradisional-modernis yang terjadi pada tahun 1920-an dan 1930-an. Akar krisis NU-Masyum kembali ke perbedaan pendapat di akhir tahun 1940-an mengenai struktur partai, peran ulama dalam politik, dan distribusi kekuasaan antara tradisional dan modernis. Antara Februari dan Juli 1952, krisis NU-Masyum didasarkan pada tiga fase utama, yaitu:

1. Yang berakhir pada awal April dan ditandai dengan negosiasi dan berbagai gerakan kuat terkait dengan tugas baru yang terkait dengan pemerintahan, yaitu . ketika NU berusaha mempertahankan jabatan menteri agama.
2. Sejak April hingga awal Mei, NU secara resmi memutuskan keluar dari Masyum melalui forum-forum internal.

3. Jangka waktu tiga bulan sejak awal Mei adalah saat para pemimpin NU melaksanakan keputusan untuk mengundurkan diri Pada awal September 1951, dibentuk Majelis Permusyawaratan Politik (MPP) di PBNU.

Majelis dipimpin oleh K.H Mohammad Dachlan (1909-1977) dan politisi papan atas NU duduk di dalamnya. Selain menasihati PBNU tentang isu-isu politik yang sedang berlangsung, MPP juga menyusun rencana agar NU menjadi partai. Orang terpenting dalam petisi adalah Wahab Chasbullah. Sebagai ekstremis yang setia membela Islam tradisional dan otoritas ulama, ia melihat marginalisasi NU dalam Masyum sebagai pengulangan serangan kaum modernis akhir 1920-an dan awal 1930-an. Mukhtamar NU XIX dimulai pada tanggal 26 April dan berlangsung selama 5 hari. Mukhtamar adalah yang terbesar dengan 23 delegasi yang mewakili 86 dari 13 cabang NU Perundingan antara NU dan pemerintahan Masyum untuk memberlakukan pemisahan terjadi pada Mei Agustus 1952. NU secara resmi menarik diri dari Masyum pada 31 Juli 1952. Kepergian NU dari Masyum memerlukan analisis yang mendalam atas beberapa faktor. Yang pertama adalah pengaruh karakter individu terhadap pengaruh kekuatan sosial, budaya dan sejarah yang lebih luas.

2. NU 1953-1955 (Perjuangan NU Meraih Kekuasaan)

Antara tahun 1952 dan 1955, ketika NU mulai membangun organisasinya dan menetapkan pendekatan terhadap politik. Ada dua hal yang mendominasi pemikiran NU saat itu, yaitu pembangunan partai dan keikutsertaannya dalam pemerintahan Ali Sastroamidjojo. Munculnya isu-isu patronase, kepemimpinan dan implementasi prinsip-prinsip Islam jelas mengungkapkan prioritas dan perilaku politik NU. Setelah menjadi partai, NU harus melalui periode pasif dan tidak aktif lagi. Keanggotaannya yang berjumlah turun dari lebih dari 100.000 pada awal 1940-an menjadi lebih dari 51.000 pada tahun 1952 dan cabang aktif turun dari 120 menjadi kurang dari 100. Administrasi NU berantakan, keuangannya terbatas, dan kegiatan keuangan yang disponsornya terhenti setelah jatuhnya Syirkah Mu'awanah pada masa pendudukan Jepang. Sebagian besar transisi NU dipimpin oleh Wahid Hasyim, presiden muda PBNU. Perlu dicatat bahwa loyalis Masyum termasuk Abdullah Syafi'i, salah satu dari kis Jakarta yang

sangat berpengaruh, dan putra Hasyim Asy'ar, Karim Hasyim, yang menjadi calon Masyum dalam pemilu 1955. Salah satu hasil rekrutmen awal partai adalah Imron Rosyadi (1916-1993). Ia berasal dari keluarga kaya tradisional di Indramayu, Jawa Barat, menyelesaikan pendidikan sekolah umum sebelum pergi ke luar negeri, dan kemudian menerima gelar Sarjana Hukum di Bagdad.

Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1952, NU merekrut Imro dan mengangkat Anshor sebagai presiden pada tahun 1953. Ia menjadi anggota PBNU selama tahun berikutnya, orang pertama di PBNU yang berpendidikan tinggi dan menjadi anggota vokal organisasi tersebut. . parlemen setelah pemilihan umum tahun 1955. Hasil selebriti lain selama periode ini termasuk Mr. Sunarjo (lahir 1908), Pengacara Jawa Tengah Mohammad Hanafiah (lahir 190), berpendidikan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Rantau Selatan Kalimantan, mandiri. Burhanuddin dari Banjarmasin, Rachmat Muljomiseno seorang banker terkemuka dan R. Saleh Surjoningprodjo pensiunan direktur kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Akhirnya, pada tahun 1950-an, ketiganya menjadi menteri.

Salah satu kemunduran bagi NU adalah meninggalnya Wahid Hasyim dalam kecelakaan mobil pada April 1953. Pada usia 38 tahun, ia menjadi pemimpin yang paling dipercaya dan populer. Sejak pertengahan 1930-an, bersama Machfoedz Siddiq dan Abdullah Ubaid, banyak melakukan reformasi dan modernisasi di NU. Ia bukan hanya putra ulama paling berpengaruh Hasyim Asy'ar, tetapi juga adalah pemimpin baru teladan NU, seorang pemimpin yang menggabungkan lingkungan Islam tradisional Jawa dengan sistem pendidikan dan moral dunia sekuler modern. Mohammad Dachlan menjadi wakil presiden dan terpilih sebagai presiden pada Kongres 1954. Awal tahun 1953, NU mulai mendekati PNI dan partai-partai nasionalis kecil lainnya. Ada beberapa alasan dilakukannya fase . Menurut Feith, dinamika perubahan antara Masyum dan PNI membuat PNI semakin diminati NU. Di Masyum, meningkatnya kontrol kubu Natsiri atas politik partai membuat partai semakin teknokratis dan rasional. Pada saat yang sama, anggota-anggota PNI yang moderat, seperti Sidik Djojokusarto dan Ali Sastroamidjojo, memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap para teknokrat yang berkerumun di sekitar Wilopo. Oleh karena itu, NU lebih banyak memiliki kesamaan dengan PNI dibandingkan dengan Masyumi dalam politik. Sejak awal

tahun 1955, kekuasaan pemerintah telah dirongrong oleh kondisi ekonomi yang memburuk, pergantian pejabat karena kasus korupsi, dan ketidakmampuan untuk mendikte kehendaknya kepada militer. Pada 20 Juli, NU juga mundur setelah melihat pemerintah saat itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Empat hari kemudian, Ali bin Abi Thalib Sastroamidjoyo mengembalikan mandatnya.

Sejak awal tahun 1955, kekuasaan pemerintah telah dirongrong oleh kondisi ekonomi yang memburuk, pergantian pejabat karena kasus korupsi, dan ketidakmampuan untuk mendikte kehendaknya kepada militer. Pada 20 Juli, NU juga mundur setelah melihat pemerintah saat itu sudah tidak dipercaya lagi. Empat hari kemudian, Ali bin Abi Thalib Sastroamidjoyo mengembalikan mandatnya.

1. NU 1973 (Fusi)

Pada tahun 1970, Presiden Soeharto mengumumkan niatnya untuk mengelompokkan partai politik menjadi 9 partai dan di hadapan Golkar yang ikut pemilu 1971. Pemerintah ingin mengklasifikasikan partai-partai yang ada saat ini menjadi tiga jenis, yaitu nasional, intelektual dan tenaga kerja. Golongan Nasional ini menghimpun PDI, Murbani, IPKI, PNI (termasuk Parkindo dan Partai Katholik yang sebenarnya adalah golongan rohani tetapi kemudian bergabung dengan Golongan Nasional).

Kelompok spiritual yang menyatukan NU, Parmus, PSII dan Perti. Gagasan penggabungan ini sebenarnya ditentang oleh banyak fraksi yang di polorin oleh fusi, termasuk sebagian dari partai NU, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, namun pada akhirnya dilaksanakan, meskipun pemilihan umum 1971 tidak melaksanakan gagasan tersebut. Pada tanggal Maret 1970, dibentuklah kelompok yang menyatukan PNI, Murba, IPKI, Partai Katolik dan Parkindo. Sementara itu, pada 1 Maret 1970, terbentuk kelompok spiritual, antara lain NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Pelaksanaan penggabungan ini menimbulkan masalah, karena ternyata IPKI dan Murba tidak memiliki wakil di DPR, sedangkan pemilihan umum MPR tahun 1971 memutuskan hanya akan ada tiga kontestan pada pemilihan berikutnya (1977).

Perpaduan akhirnya terjadi pada tahun 1973: PPP dibentuk pada tanggal 5 Januari 1973, menyatukan NU, Pert, PSII dan Parmus; dan pada 10 Januari, PDI dibentuk untuk mewakili partai nasionalis, Parkindo, dan Katolik. Perjanjian merger PDI ditandatangani oleh Achmad Sukarmadijaja dan MH. Sadri (IPKI), Ben Mang Reng Sey dan ES Wignjosoemarsono (Partai Katolik), A Wenas dan Sabam Sirait (Parkindo), S. Mubantoko dan Djon Pakan (Murba) dan Mh. Isnaeni dan Abdul Madjid (PNI). Sementara KH Idham Chalid (Partai NU), Mohammad Syafaat Mintaredja (Parmusi), Haji Anwar Tjokroaminoto (PSII), Haji Rusli Halil (Perti) dan Haji Masjkur, Ketua Fraksi Persatuan DPR, mewakili fusi PPP. Penggabungan ini berdampak berbeda terhadap partai-partai yang ada: PDI dan PPP. Golkar, yang tidak terpengaruh oleh penggabungan dan diuntungkan dari semua kebijakan Soeharto, menjadi penyangga sistem pemerintahan yang diprakarsai oleh Soeharto, tidak terpengaruh oleh fusi.

Di dalam tubuh PDI agitasi dan konflik mulai muncul secara luas sejak tahun 1977 setelah Kongres PDI tahun 1977 dimana Sanusi Hardjadinata (ketua umum) dan Usep Ranuwidjaya diangkat menjadi Sekjen. Konflik meningkat hingga pergantian direktur umum dan sekretaris jenderal (Sanusi dan Usep). Konflik di tubuh PDI terus berlanjut dan ketika tidak terselesaikan, pemerintah diminta turun tangan agar nilai nilai yang disetujui pemerintah bisa masuk. Sanusi dan Usep menggantikan MH. Isnaeni dan Soenawar Soekowati, yang membentuk panitia PDI versi mereka sendiri.

Rekonsiliasi yang diprakarsai oleh Soedjono Humardan antara kedua kubu ini menyatukan faksi yang bertikai dan membentuk DPP baru: Presiden Jenderal (Sanusi) dan tetap presiden masing-masing Usep, Soenawar, Abdul Majid, MH. Sampai Isna. Konflik berlanjut karena setelah itu Sanusi membebaskan MH Isnan dan Soenawar Soekowat; dan mereka menanggapi dengan mencopot Sanusi sebagai CEO. Pada 16 Oktober 1980, Sanusi mengundurkan diri sebagai presiden PDI dan konflik terus berlanjut. Di badan PPP yang sama, tidak begitu sulit dan konflik masih terjadi. Pertempuran dimulai pada tahun , konvensi pertama yang diadakan sejak penggabungan. Pada tahun 1975 diadakan Musyawarah Nasional I PPP Tahun 1976.

Ternyata hingga tahun 1976 Mukhtamar masih belum terlaksana karena konflik antar unsur yang terlibat dalam pimpinan DPP Partai . penasehat. Dewan, Dewan Syuro, Presiden Partai dan Manajer Umum. Meskipun demikian, PPP tetap berpartisipasi dalam pemilu 1977, yang membuat NU ketakutan. Pasca Pemilu 1977, pertikaian antara faksi-faksi PPP untuk mempertahankan posisinya semakin dalam dengan campur tangan pemerintah yang menyebabkan perpindahan jabatan pimpinan PPP dari Mintaredja ke J. Naro pada tahun 1978. Pergantian kepemimpinan ini tidak terjadi dari Mukhtamari. proses yang membuat segalanya menjadi lebih rumit. Pada tahun 1979, Naro mengajukan gagasan mengadakan Kongres pada tahun 1982, meskipun setelah Mintaredja diganti, Naro berjanji akan mengadakan Kongres pada tahun 1979 (dan Kongres PPP pertama tidak berlangsung sampai tahun 197). Konflik itu dipadamkan dengan kesepakatan bersama. pimpinan tiap unsur pada 6 Maret 1980. Selain itu, partai juga memutuskan menerima keputusan politik Soeharto terkait simbol partai. PPP mengganti simbol Ka'bah dengan huruf persegi panjang hitam.

Ketidakpuasan terhadap fenomena PPP terus berlanjut. Kali ini dari Jawa Tengah. Pada 1979, Agus Miftach terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Komisi Reformasi Pusat PPP di Jakarta oleh para pimpinan partai-partai Islam yang tergabung dalam PPP tingkat pusat. Versi itu menyatakan bahwa pada tahun 1980, Agus Miftach terpilih sebagai Presiden Umum Ppp menggantikan Mintaredja S.H dan kemudian secara resmi bertemu dengan Wakil Presiden Adam Malik dan SekretarisKementerian Dalam Negeri R. Soeprpto untuk membuat persetujuan. . untuk menggantikan jalur PPP. Tapi Soeharto tetap memilih Naro. terpilihnya Naro memberikan dampak yang luas bagi eksistensi NU baik berupa eksklusivitas maupun pemilu di bawah pimpinan PPP, bahkan pada Mukhtamar tahun 1984